

MENGOPTIMALKAN PERAN RADIO KOMUNITAS SEBAGAI RUANG PUBLIK & MEDIA INTERAKSI KOMUNIKASI LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN

(Studi pada Radio Komunitas Denta FM Sumbermanjing Kulon Kecamatan
Pagak dan RadioJaya FM Mendalan Wangi Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang)

EkoAgus Susilo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang

Email: ekoagus.susilo@unmer.ac.id

Abstract

Unlike the private radio whose primary interests is reaping economic profit at the expense of organizing other social benefit, community radio is the one that is owned, managed by, from and for the community's wellbeing. It is a local, low-power broadcasting specifically designed for serving the entire interest of community members. It puts audiences' cultural identity development at its top priority. Unfortunately, this deal never materialize due to its poor human resources quality in managing the radio station and producing on-air radio program as well as its broadcaster's inadequate announcing skills especially with regard to broadcasting code of conduct. To make things even worse, its on-air program broadcast operates exclusively for the owner's interest and meeting its restricted fans club members. As such, its daily on-air radio content program does not take the people's interest into consideration. It does not involve its other stakeholders such as village government apparatus, prominent leaders, and its faithful listeners in both radio management as well as radio program broadcasting development. To help solve the problem, this IBM project have designed as a series of capacity building methods by means of in-class training as well as on the job clinic coaching for community radio staffs and practicing ads production at Communication Department Laboratory. The training module covers on-air radio broadcasting code of conduct, announcing skills, spot advertising and radio program production. To facilitate their capacities building, the project has granted a set of technical devices such as digital voice recorder and station transmitter link. Like wise, it trained radio community stakeholders on matters such as the definition, regulation of community radio along with ideal organizational structure which was solely aimed at having them participate in operating radio management. There search found that after capacity building intervention activities, the radio personnel program broadcasting skills has improved significantly. Similarly, the stakeholders' skills have also increased. Seeing from this, radio community can operate as villagers public sphere; an arena for deliberating on matters on common concerns and then reaching a consensus of the problem for their sole future betterment.

Keywords: *Community Radio, Public Sphere, Participation, Radio Program
Broadcasting Development Skills, Community Empowerment*

1.PENDAHULUAN

Pengakuan hukum terhadap keberadaan radio komunitas yang dibuktikan dengan pemberlakuan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan awal dimulainya

demokratisasi sistem penyiaran nasional setelah tiga dekade lebih domain tersebut didominasi oleh pengusaha dan penguasa untuk melanggengkan kepentingan mereka. Kepemilikan media penyiaran yang sebelumnya hanya dikuasai segelintir elit kekuasaan sekarang telah menyebar merata dan beragam (*diversity of mediaownership*). Demikian juga dengan isi media penyiaran yang dulu ditentukan oleh kepentingan ekonomi politik pusat kekuasaan, saat ini pun telah beragam (*diversity of content*). Berbeda

dengan era, saat ini masyarakat dapat menggagas secara bersama-sama pendirian stasiun radio lantas mengelolanya serta ikut serta menyelenggarakan program siaran demi memenuhi kebutuhan warga setempat. Tidak sama dengan media massa arus utama yang menggunakan teknologi canggih, tenaga profesional, bertempat dikota utama dengan wilayah jangkauan siaran regional atau nasional, bertujuan komersial dengan program siaran yang ngepop, radio komunitas memanfaatkan teknologi sederhana, tenaga amatir, berada di pedesaan dan daerah terpencil dengan jangkauan wilayah siaran terbatas tapi bertujuan memberdayakan warga

Tabel 1
Beda Jenis Radio

Perihal	Radio Komunitas	Radio Swasta	Radio Publik
Ide/latar belakang pendirian	Sosial ekonomi atau pengembangan komunitas (masalah,kebutuhan &potensi).	Ekonomi atau perolehan keuntungan.	Politik negara, Publik dan pembangunannasional.
Tujuan/prioritas utama pihak penerima manfaat	Komunitas	Pendiri/ Pemilik	Publik Luas
Sasaran siaran	Komunitas Lokal	Seluas- luasnya	Seluas- luasnya
Strategi pendanaan	Peranserta komunitas, sumbangan (pihaklain	Pendirian program siaran sesuai keinginan pengusaha/sponsor	Pemerintah dan program siaran sesuai keinginan pengusaha/sponsor

	yang tidak mengikat). & program siaran kerjasama sesuai kepentingan komunitas.		
Karakter Kelembagaan	Inklusif (terbuka)	Eksklusif (tertutup)	Eksklusif (tertutup)
Orientasi operasionalisasi	Nonprofit/ notfor profit	Profit	Campuran
Staffing	Kaderisasi & Relawan	Karyawan/pekerja dan Profesional	Karyawan/pekerja & Profesional
Peralatan & pembiayaan	Dapat dimulai dengan yang sangat sederhana & murah	Menuntut peralatan yang cukup kompleks, canggih & mahal untuk memulai	Menuntut peralatan yang cukup kompleks, canggih & mahal untuk memulai

Sumber: Gazali, Effendi, Menayang, V. (ed.), (2003: 126)

Meski telah ada organisasi yang menaungi radio komunitas yakni Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), secara nasional tidak ada data pasti tentang jumlah radio komunitas. Situs internet JRKI mencantumkan ada 18 propinsi yang telah memiliki JRKI yakni Jawa Barat, Jabotabek, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Utara, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, NTT, Kalimantan Barat, dan Nanggara Aceh Darussalam. Kurang lebih ada 70 stasiun radio komunitas di Jawa Timur menurut situs tersebut. Data pasti tentang keberadaan radio komunitas di Kabupaten Malang juga tidak disebutkan dalam situs tersebut. Tapi dapat diperkirakan ada puluhan.

Secara umum, dilihat dari aspek sejarah pendiriannya, radio komunitas memiliki dua

tipe. Pertama, yaitu radio yang didirikan dari sekelompok orang atau individu yang memiliki hobi memainkan alat-alat komunikasi. Karena peralatan yang dibutuhkan cukup mudah di rakit, maka sebuah radio akan dengan cepat berdiri dan siarannya dapat didengarkan untuk jangkauan 2-10km. Dalam perjalanannya, keberadaan radio-radio komunitas akan ditentukan oleh kemampuan dalam beberapahal yang bersifat teknis dan manajerial. Kemampuan teknis seperti menangani kerusakan alat yang biasanya terjadi sewaktu-waktu. Disamping itu, kemampuan pengelola memobilisasi dukungan pembiayaan untuk mengganti perangkat tertentu yang rusak. Sementara kemampuan manajerial terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang konsisten menjalankan kegiatan operasional radio sehari-hari. Pada area

ini memang seringkali radio komunitas mengalami masalah, karena meskipun kehadirannya telah diterima dimasyarakatnya, namun sejak awal mereka tetap dijalankan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat bahkan beberapa individu saja. Dalam hal ini, radio komunitas tersebut hadir begitu saja tanpa keterlibatan dalam kehidupan sosial sehari-hari yang real. Kedua, adalah radio yang berdiri atas inisiasi LSM atau organisasi nonpemerintah yang bekerja ditingkat lokal masyarakat. Intervensi kelompok-kelompok pemberdayaan ini bisa bersifat langsung, misalnya dengan menyediakan dana atau peralatan hingga mengawal konten dan pengelolaannya atau secara tidak langsung, misalnya memberikan visi dan asistensi teknis diawal pendiriannya. Meskipun hasilnya bervariasi, namun pola intervensidiawal tersebut kelak juga akan menentukan peran radio selanjutnya sebagai alat kritik sosial. Berbeda dengan yang tipe pertama, radio ini lahir dengan cita-cita untuk aktif terlibat dalam praktek sosial politik masyarakat pendengarnya. Gagasan perubahan sosial yang diusung oleh LSM/ ornop disini diinternalisasi kepada sekelompok anggota masyarakat yang dilibatkan untuk menjadi pengelola radio. Kekawatiraanya adalah kemandirian warga dalam mengelola radio setelah ditinggalkan LSM tersebut.

Berkaitan dengan pengertian radio komunitas, berbagai sumber memaparkannya sebagai berikut ;

”Suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkungan atau wilayah atau daerah tertentu, yang diperuntukkan khusus bagi warga setempat, yang berisikan acara dengan ciri utama informasi daerah (*local content*) setempat diolah dan dikelola oleh warga setempat. Lingkungan atau wilayah yang dimaksud bisa didasarkan atas faktor geografisnya (bisa dalam kategori teritori kota, desa, wilayah atau kepulauan). Tetapi, bisa juga berdasarkan kumpulan dari masyarakat tertentu tetapi dengan tujuan yang sama dan karenanya tidak perlu dengan persyaratan harus tinggal disuatu wilayah geografis tertentu”.

Louie N Tabing dalam Hinca Pandjaitan (2000: 34)

”Community radio responds to the needs of the community it serves, contributing to its development within progressive perspective in favour of social change. Community radio strives to to democratize communication through community participation in different forms in accordance withits specific social context.”

World Association of Community Broadcaster (AMARC) 1998.

Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 pasal 21-24 menjelaskan radiokomunitas adalah:

“Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga ini diselenggarakan:

1. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
2. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.
3. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
4. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
5. didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut

6. dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat
7. dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing
8. dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat
9. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu”.

Dari beberapa definisi di atas, Louie Tabing (2002:11) memaparkan karakteristik utama radio komunitas adalah sebagai berikut:

1. Melayani kepentingan komunitas yang jelas identitasnya;
2. Mendorong berlangsungnya demokrasi partisipatoris;
3. Memberikan peluang kepada warga untuk berkomunikasi dan ikut serta dalam pembuatan program, manajemen dan pemilikan lembaga penyiaran;
4. Menggunakan teknologi yang murah dan sederhana yang tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap sumber-sumber lain;
5. Didorong oleh semangat kebersamaan dan kemaslahatan komunitas, bukan

oleh pertimbangan ekonomi; memperlancar terjadinya penyelesaian masalah

Dari watak utama radiokomunitas ini, Louie Tabing lantas mendeskripsikan beberapa prinsip yang mesti diterapkan dalam sebuah radio komunitas. Prinsip-prinsip ini mencakup:

- a. Akses terhadap fasilitas penyiaran merupakan langkah awal menuju demokratisasi sistem komunikasi. Warga memiliki akses tidak hanya terhadap produk media tapi juga fasilitas media. Saluran umpan balik selalu terbuka dan interaksi yang intensif antara produsen dengan konsumen pesan selalu terjaga.
- b. Partisipasi dalam produksi dan manajemen lembaga penyiaran merupakan konsekuensi logis dari adanya kemudahan dalam mengakses media penyiaran. Partisipasi warga dalam radio komunitas dibuka lebar pada semua level—mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Partisipasi warga mencakup proses pembuatan keputusan termasuk keputusan tentang isi, durasi, jadwal program acara. Warga atau perwakilan warga juga peran dalam manajemen dan keuangan program radio.
- c. Swa-kelola/pengelolaan sendiri semua fasilitas komunikasi akibat dari adanya

keterlibatan warga. Ketika warga komunitas telah mendapatkan pengalaman yang diperlukan dan memperoleh ketrampilan yang dipersyaratkan, maka tidak ada alasan untuk menghalangi mereka untuk mengelola dan memiliki radio komunitas.

- d. Mandat komunitas merupakan akibat yang tak terhindarkan dari proses demokratisasi sistem komunikasi. Mandat ini mencakup tidak hanya aspek manajemen tapi juga kepemilikan sekaligus.
- e. Akuntabilitas publik merupakan akibat lanjutan dari adanya peluang warga untuk mengelola, mengawasi kinerja radio komunitas.

Berdasar paparan diatas dapat ditarik simpulan adanya perbedaan penting antara radio komunitas dengan radio utama dilihat dari berbagai hal seperti letak daerah, tujuan, pemilikan, manajemen, jam siaran, staf penyiar, transmitter, fasilitas, sumber dana, partisipasi masyarakat, dan bentuk dan manfaat. Hal seperti ini tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel2
Beda Radio Komunitas & Radio Utama

Hal	Radio komunitas	Radio Utama
Letak daerah	Terpencil/pulaukecil	Kota Utama Kota Besar Jumlah Populasi besar
Tujuan	Pengembangan Pendidikan(Apayangbaik bagi suatu komunitas)	Keuntungan Keuntungan Politik (Apa yang baik bagi pemilik)
Pemilikan	Komunitas	Kapitalis/ Pengusaha PolitikusSekolah dan Badan Keagamaan
Manajemen	Badan Komunitas Media	Direktur
JamSiaran	Pendek	Ekstensif
StafPenyiar	Sukarela (biasanya Tidak dibayar)	Profesional (yang dibayar)
Transmitter	Kekuatan rendah (20-100watts)	1Kw-5Kw
Fasilitas	Amat biasa	Amat memuaskan
Sumber Dana	Bantuan dari komunitas Pendoror Subsidi	Iklan
Partisipasi Masyarakat	Tinggi	Minimal
Bentuk dan manfaat	Demokrasi	Terpakupadausaha Dankepentingan politik.

Sumber: Hinca P(2000:36)

Orientasi utamakinerja LPK yang menitik beratkan pada layanan publik dan memenuhi semua kepentingan warga masyarakat dari berbagai latar belakang, LPK dapat dianggap sebagai ruang publik (*public sphere*). Hal ini menurut David Croteau (2003:20-21) karena penyiaran publik memainkan peran strategis dalam proses demokratisasi dengan membentuk masyarakat sipil lewat perluasan

Ruang-ruang sosial politik yang memperlancar

terjadinya dialog publik. Untuk dapat berfungsi sebagai public sphere, lanjut David Croteau, LPK harus mandiri dalam mengelola lalu lintas komunikasi tanpa ada pembatasan dari pemerintah serta memberikan ruang kepada publik untuk mengawasi kinerja operasional. Hal ini karena LPK memandang khalayak bukan sebagai konsumen tapi sebagai warga (*citizen*) yang harus peduli dan berpartisipasi aktif dalam

membangun lingkungan sosial politiknya. Partisipasi ini hanya dapat terjadi kalau LPK memfasilitasi proses dialog publik tentang masalah-masalah publik secara mendalam dan berkelanjutan.

Disamping itu, keberadaan media publik diperlukan sebagai sarana penyeimbang media komersial yang cenderung merusak kualitas ruang publik akibat dorongan keuntungan yang menggerakkan operasional media ini. Artinya, melayani kepentingan publik sulit dikompromikan dengan aspek meraup keuntungan. Model media berbasis pasar dan model media ruang publik menurut David Croteau (2003:21-24), akan selalu berada dalam posisi yang saling berlawanan. Media berbasis pasar, menurut Croteau memiliki beberapa kelemahan seperti dibawah ini:

1. Pasar cenderung tidak demokratis karena ia memperlakukan konsumen secara diskriminatif berdasarkan kemampuan daya beli. Sedangkan, demokrasi menganggap bahwa semua warga memiliki kesetaraan dan kesamaan hak.
2. Pasar cenderung melanggengkan ketimpangan sosial akibat kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang antara masing- masing orang.
3. Pasar cenderung tidak bermoral karena tidak mampu memberikan justifikasi etis kenapa suatu produk atau jasa dibeli atau

dijual. Yang terpenting bagi pasar adalah mendorong khalayak untuk membeli dan membeli dengan manipulasi citra tanpa mempedulikan apakah produk itu berguna atau merugikan khalayak.

Terdapat perbedaan mencolok antara media media swasta yang berorientasi kepada pasar dengan media public sphere. David Croteau(2003:36-37),lantas membuat perbandingan antara kedua model tersebut. Salah satu faktor yang membedakan kedua model tersebut, menurut Croteau, adalah cara memandang khalayak. Model media pasar melihat khalayak sebagai konsumen sehingga keberagaman disini lebih dipahami sebagai strategi untuk menysasar target ceruk pasar demografis tertentu. Sebaliknya, model public spheremelihat khalayak sebagai warga negara yang harus ditransformasi diberikan pendidikan, diberikan informasi dan dihibur. Singkat kata, mereka harus dilayani agar mampu menjalankan hak-hak dan kewajiban- kewajiban demokratis mereka.

Hal lain adalah tentang ukuran kesuksesan; model pasar menganggap keuntungan sebagai ukuran sukses sementara menurut model publicsphere adalah melayani kepentingan publik. Juga, tentang definisi kepentingan publik; Pasar

adalah isi program yang populer sementara public sphere adalah yang substantif, inovatif dan beragam.

Disamping itu, pemahaman tentang keberagaman dan inovasi: Model pasar menganggap inovasi akan mengancam keuntungan dan keberagaman lebih dipahami sebagai sarana untuk memperluas ceruk pasar. Sementara, menurut model public sphere inovasi merupakan hal yang esensial untuk mendorong partisipasi warga dan

keberagaman dianggap sebagai instrumen untuk mengakomodasi semua kepentingan dan selera warga. Berikut adalah gambaran perbandingan antara kedua model.

Tabel 3
Perbandingan Model Media Pasar dan Model *Media Publicsphere*

Karakter	ModelPasar	ModelPublicSphere
Konseptualisasi Media	Perusahaan Swasta	Sumber Daya Publik Untuk Melayani Kepentingan Publik
TujuanUtama Media	Mencari Keuntungan Untuk Para Pemilikdan Pemegang Saham	Menggairahkan hidup Kewargaan (<i>active citizenship</i>) lewat informasi, edukasi dan hiburan.
Anggapan TerhadapKhalayak	Sebagai konsumen	SebagaiWarga
Media Mendorong Khalayak untuk Melakukan Apa?	Menikmati diri mereka, menonton iklan danMembeli produk.	Belajar tentang Lingkungan mereka dan menjadi warga yang peduli
Kepentingan publik	Yang populer; Disukai orang banyak	Yang substantif, Inovatif dan beragam meski kadang tidak populer.
Peran keberagaman dan Inovasi	Inovasiakan ancam keuntungan; Keberagaman menjadi strategi mencari pasar baru.	Inovasi penting untuk Dorong khalayak menjadi warga aktif, dan keberagaman penting untuk mengakomodasi semua kepentingan.

Regulasi dipahami sebagai	Ancaman	Sarana melindungi Kepentingan publik.
Pertanggungjawaban kepada	Pemilik dan Pemegang Saham	Publik dan Perwakilan Pemerintah
Ukuran Sukses	Keuntungan	Layanan public

Sumber: David Croteau (2003:37)

Untuk mewujudkan ideal tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Belum operasionalnya struktur manajemen yang telah dibentuk. Tidak heran kalau pemilik radio harus mengelolanya sendiri. Hal ini juga berimbas pada lemahnya dukungan dan akibatnya belum operasionalnya pemasaran dan produksi siaran iklan layanan masyarakat.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola radio; dari total pengelola yang ada belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen radio komunitas yang mencukupi. Dia akhirnya harus menangani masalah ini sendiri.
3. Program-program pemberitaan warga (*citizen reporter*) belum dapat dilaksanakan akibat minimnya tenaga yang mampu menangani masalah tersebut.
4. Pemahaman tentang esensi, manajemen ideal beserta aspek regulasi penyiaran komunitas belum merata dikalangan para pemegang kepentingan radio. Meski struktur organisasi telah terbentuk. Namun struktur tersebut disusun tidak secara partisipatif yang melibatkan mereka. Hal ini karena struktur tersebut disusun dalam rangka memenuhi aspek formal legal pendirian dan proses perijinan penyelenggaraan siaran radio komunitas.
5. Minimnya sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan siaran akibat dari ketatnya peraturan tentang penyelenggaraan radio komunitas yang hanya mengandalkan sumber biaya dari donasi, sumbangan yang tidak mengikat, dan iklan layanan masyarakat.
6. Dukungan teknis peralatan terutama untuk produksi siaran sehingga tidak mampu memproduksi siaran sendiri. Alat relay siaran untuk penyelenggaraan siaran langsung telah rusak sehingga tidak dapat menyelenggarakan siaran langsung yang diinginkan masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penelitian ini mendeskripsikan bagaimana mengoptimalkan peran Radio Komunitas sebagai ruang publik dan media interaksi

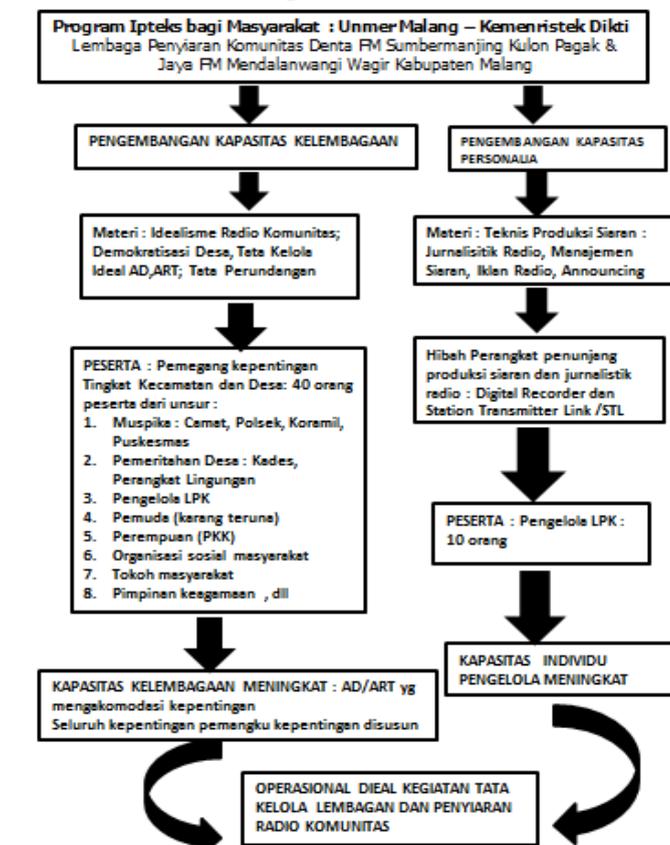
komunikasi dan informasi antara stakeholders.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tindakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data lewat observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian adalah pemilik pengelola baik Radio Denta FM yang berlokasi di Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak maupun radio JayaFM di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir. Masing-masing terdiri dari Drg. Puji L. Gunawan, Yudo Sukisno, Yuswantoro, Edy Susilo dan Wasit, Djazuli. Sedangkan

dari stakeholder adalah Sujono, Rudi dan Seksi Bimas Polsek Wagi. Pengumpulan data dilakukan setelah informan mendapat intervensi kegiatan pelatihan, pendampingan laboratorium, coaching klinik di masing-masing lokasi radio serta hibah peralatan perekam suara dan Station Transmitter Link untuk membantu mendukung kegiatan liputan pemberitaan. Metode intervensi yang digunakan dapat digambarkan pada diagram grafis dibawah ini.

Gambar1
Metode intervensi pada kedua radio komunitas



Sumber: diolah oleh peneliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: *Pertama*, pelatihan teknis mengelola program siaran dan stasiun radio di ruang kelas dan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, Diskusi kelompok untuk menyusun skrip iklan produk. Program siaran, serta bimbingan memproduksi materi tersebut dengan arahan dari dua orang laboran. *Kedua*, pendampingan lapang di masing-masing lokasi radio komunitas tentang materi teknis yang diberikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan sebelumnya.

Ketiga, hibah perangkat perekam suara digital (*voice recorder*) beserta bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatannya. Ini untuk mendukung proses pembuatan produksi program siaran dan spot iklan. Juga pemberian perangkat siaran langsung */Station Transmitter Link* untuk mendukung kegiatan liputan lapang secara langsung beserta bimbingan teknis penggunaannya serta uji coba siaran interaktif langsung di luar studio pusat.

Keempat, pelaksanaan pelatihan kepada stakeholders radio di Kecamatan Wagir dan Pagak dengan materi yang berkaitan dengan substansi, filosofiserta regulasi perundangan radio komunitas serta menyusun draft AD&ART radio komunitas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melibatkan semua stakeholder dalam proses pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio.

Kegiatan ini telah berdampak pada : *Pertama*, meningkatnya Pemahaman Teoritis para pengelola dan stakeholders tentang Tata Kelola LPK serta Teknis Produksi Siaran & Spot iklan dan program meningkat; *Kedua*, kemampuan pengelola untuk mempraktekkan Tata Kelola stasiun LPK serta Produksi siaran juga telah meningkat. *Ketiga*, kemampuan mereka untuk menggunakan STL untuk melaksanakan kegiatan siaran langsung juga meningkat.

Keempat, telah meningkatnya pemahaman baik dari para pengelola dan stakeholder tentang pengertian dan pedoman etik perilaku siaran serta telah terjadinya saling memahami peran masing-masing stakeholders dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini pihak pengelola radio telah berkomitmen untuk melibatkan stakeholders dalam manajemen dan penyelenggaraan siaran LPK. Ini dapat dilihat dari Kepolisian Sektor Wagir untuk memanfaatkan peluang bersiaran ini untuk menyampaikan informasi tentang penyuluhan hukum kepada warga masyarakat. Sementara dari pihak perangkat desa juga akan menggunakan peluang ini untuk sosialisasi penggunaan Dana Desa serta materi lain seperti hal administrasi kependudukan.

Dari paparan diatas, dapat disampaikan bahwa LPK telah mampu menjadi ruang

publik yang berfungsi untuk proses diskusi bersama antara stakeholders berkaitan dengan permasalahan bersama untuk semata-mata mencari kesepakatan bersama tentang permasalahan tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Penyiaran Komunitas berperan strategis sebagai media komunikasi dan informasi bagi kalangan akar rumput. Ini harus dibarengi dengan fasilitas akses terhadap program peningkatan kapasitas individu pengelola, dan penyiar. Para penyiar yang merupakan ujung tombak proses pendidikan dan pencerdasan masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi tersebut akibat minimnya pengetahuan tentang teknis dan perangkat perungadan dan etika penyiaran radio. Frekwensi radio yang seharusnya menjadi ruang publik telah beralih menjadi ruang privat (tempat perbincangan hal-hal yang bersifat privat), bahkan lebih buruk lagi menjadi kontra produktif terhadap proses memburuknya interaksi sosial masyarakat.
2. Hal tersebut lantas diperburuk dengan minimnya dukungan sumber pendapatan dari kegiatan siaran akibat pembatasan kota oleh perundangan penyiaran. Minimnya sumber pendapatan ini kalau tidak segera diatasi akan menyebabkan matinya LPK akibat minimnya sumber pendapatan yang juga diakibatkan oleh salah kelola dalam menata kelembagaan LPK.
3. Di tengah nihilnya bantuan teknis pengembangan kapasitas personalia dan kelembagaan dari pihak pemerintah terkait seperti Dinas Kominfo atau KPI, maka kehadiran program Ipteks ini telah memicu semangat mereka untuk terus giat mengembangkan kapasitas diri mereka. Pengembangan kapasitas ini diharapkan akan mampu memberlangsungkan operasional kegiatan siaran LPK yang ideal. Ini satu-satunya jalan keluar. Kalau tidak, maka perangkat siaran yang mahal dengan derajat perawatan perangkat yang mahal juga akan mangkrak tidak berguna sama sekali.
4. Kegiatan pelatihan teknis dan teoritis ini telah memantik semangat kebersamaan antar pengelola lintas stasiun LPK serta memacu semangat saling berbagi pengalaman teknis untuk kemajuan bersama. Ini dapat dilihat dari wacana untuk membuat konsorsium produksi dan penayangan iklan bersama antar pengelola LPK.
5. Tata kelola kelembagaan menjadi strategis demi menjaga keberlangsungan sebuah LPK. Secara kelembagaan kedua mitra masih lemah. Ini dapat dilihat dari struktur

kelembagaan yang meniadakan adanya struktur dewan pengawas LPK. Operasional dan pemeliharaan peralatan studio kedua mitra masih didukung penuh oleh kedua pemilik LPK.

6. Para pemegang kepentingan yang ikut dalam pelatihan telah menyatakan komitmen untuk menjalin kerjasama dengan LPK dalam sosialisasi programnya sesuai dengan kapasitas lembaganya masing masing. Demikian juga para pengelola LPK, telah menyatakan kesediaanya untuk menjadikan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengelolaan LPK termasuk menjadi anggota Dewan Pengawas Penyiaran. Dengan partisipasi mereka dalam proses baik pengelolaan dan penyelenggaraan siaran, maka LPK telah menjadi ruang public ideal; tempat memperbincangkan urusan publik demi untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata, lain radio komunitas juga dapat memantik semangat kewargaan (*civic engagement*) yang mendukung proses pembangunan desa apalagi pasca pemberlakuan UU Desa (RochmadEffendy:2013:20). Hal ini sekaligus juga menguatkan peran radio komunitas sarana demokratisasi komunikasi di pedesaan (Atie Rahmawatie:2007:124-125)

Dari simpulan diatas dapat disampaikan beberapa saran seperti di bawah ini :

Pertama, upaya peningkatan kapasitas professional pengelola perlu untuk terus dilanjutkan dengan penekanan pada aspek teknis produksi siaran iklan dan produksi spot iklan;

Kedua, peningkatan kapasitas pemasaran dan promosi LPK kepada stakeholders perlu diberikan.

Ketiga, kapasitas personalia dalam hal pengembangan dan penelitian juga perlu untuk secara berkelanjutan ditingkatkan sehingga mampu menyajikan program siaran pemberitaan;

Keempat, kapasitas pengelola dalam melaksanakan riset halyak perlu juga untuk ditingkatkan sebab LPK didirikan untuk melayani kepentingan pendengar;

Kelima, kapasitas pengelola dalam menngoptimalkan potensi serta mengedukasi para pendengar setia/fans club untuk selanjutnya direkrut sebagai tenaga relawan LPK perlu untuk terus didorong dan diarahkan.

Daftar Pustaka

Aryani, Sri & Ahmad Nasir, 2003, *Radio Komunitas Itu Sarat Kepentingan Komunitas*, dalam Gazali, Effendi, Menayang, Victor et.al (ed)., (2003), *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta

Ahmad Natsir dkk.edit, 2007, *Media Rakyat: Mengorganisasi Diri Melalui Informasi*, Combine Resource Institute bekerjasama dengan Ford Foundation.

Croteau, David & Hoynes, William, (2001),

The Business Of Media: Corporate Media and The Public Interest, Pine Forge Press, California, Amerika Serikat.

Estrada, Restrepo Sonia & Fraser, Colin, (2001), *Community Radio Handbook*, UNESCO

Effendy, Rochmad, 2003, *Peran Radio Komunitas Mustika FM Dalam Menumbuhkembangkan Civic Community: Studi Kasus Pada Radio Mustika FM Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*, Jurnal Komunikator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 5 Nomor 1 Mei 2013. ISSN 1979-6765

Gazali, Effendi, Menayang, Victor et.al (ed)., (2003), *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.

Jonathans, Errol, (2006), *Socratesdi Radio: Esai-Esai Jagad Keradioan*, Gong Plus, Yogyakarta.

Jonathans, Errol, *Jurnalistik Radio*, dalam Mirza, S Layla, (2000), *Politik dan Radio : Buku Pegangan Bagi Jurnalis Radio*, Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta

Masduki, 2003, *Radio Siaran Dan Demokratisasi*, Jendela, Yogyakarta.

-----, 2004, *Menjadi Broadcaster Profesional*, Pustaka Populer, LKIS, Yogyakarta.

-----, 2007, *Radio Komunitas: Belajar Dari Lapangan*, Bank Dunia Kantor Perwakilan Jakarta.

Pandjaitan, Hinca IP & Cahaya DR Sinaga (ed), 2000, *Prosiding Seminar Penyiaran 2000 Aspek Regulasi & Kebijakan*, Media Law Department Internews Indonesia & Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jakarta

Rahmawati, Atie, (2007), *Radio Komunitas : Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Tabing, Louie, (2002), *How To Do Radio Community: A Primer for Community Radio Operators*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Asia-Pacific Bureau For Communication and Information, NewDelhi, India, pada situs <http://www.unesco.org/webworld.radiocommunity.pdf>